



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI TJALO KERRANG**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **444392**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.213.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 569 m2/300 m2 di KAB / KOTA PINRANG, WARISAN Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA PINRANG, WARISAN Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 5.300 m2 di KAB / KOTA PINRANG, WARISAN Rp. 650.000.000
5. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 28.400 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 170.400.000
7. Tanah Seluas 21.500 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 129.000.000
8. Tanah Seluas 71.200 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 427.200.000
9. Tanah Seluas 66.987 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 422.000.000
10. Tanah Seluas 65 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
11. Tanah Seluas 66 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI



Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

550.000.0001. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.0002. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
400.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp.

132.500.000**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

56.300.000**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

Sub Total

Rp.

3.952.400.000**III. HUTANG**

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.952.400.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.